

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya reformasi dan perkembangan zaman yang menuntut perubahan ke arah kemajuan, maka dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terjadi proses pembenahan yang mengarah kepada perbaikan-perbaikan. Kemunculan dan kebangkitan gerakan reformasi di Indonesia telah menimbulkan perubahan secara drastis dan fundamental terhadap sistem pemerintahan Indonesia, yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi maka timbul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang berjalan sejak Januari 2001 tersebut dianggap sebagai suatu kebijakan yang demokratis serta sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan disertai kebijakan pemerintah mengenai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberi peluang dengan seluas-luasnya kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah tersebut kemudian diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat juga peran serta masyarakat. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah dapat meningkatkan daya saing yang memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan begitu diharapkan setiap daerah mampu mengoptimalkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Untuk menilai kemajuan perekonomian pada suatu daerah, dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun bersangkutan terhadap nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun sebelumnya.

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017

TAHUN	PDRB ADHK (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
		Proyeksi (RPJMD)	Realisasi
2013	57.690.587,2	4,65-5,70	5,92
2014	61.100.250,2	5,32-6,65	5,91
2015	64.701.521,6	5,11-6,43	5,89
2016	68.804.850,8	5,58	6,34
2017	73.051.179,3	5,69	6,17

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung (*diolah kembali*)

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2013-2017) perekonomian Kabupaten Bandung dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan terjadi kenaikan nilai PDRB pada setiap tahunnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung (LPE) tahun 2013-2017 juga menunjukkan pada setiap tahunnya telah mencapai target yang ditentukan dalam RPJMD. Kendati demikian trend Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017 menunjukkan terjadinya perlambatan nilai LPE pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung tercatat sebesar 5,92 persen, mengalami perlambatan pada dua tahun berikutnya hingga mampu meningkat kembali di tahun 2016. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung tahun 2016 mencapai 6,34 persen, jauh meningkat dibanding tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,89 persen. Hal ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dicapai selama periode lima tahun terakhir. Kemudian mengalami perlambatan kembali pada tahun 2017 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,17 persen.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai macam sektor. BPS Kabupaten Bandung menetapkan 17 kategori lapangan usaha yang dapat membentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bandung, diantaranya:

1. Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan);
2. Kategori B (Pertambangan dan Penggalian);
3. Kategori C (Industri Pengolahan);
4. Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas);
5. Kategori E (Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang);
6. Kategori F (Konstruksi);
7. Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor);
8. Kategori H (Transportasi dan Pergudangan);
9. Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum);
10. Kategori J (Informasi dan Komunikasi);
11. Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi);
12. Kategori L (Real Estat);
13. Kategori M, N (Jasa Keuangan);
14. Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib);
15. Kategori P (Jasa Pendidikan);

16. Kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial);

17. Kategori R, S, T, U (Jasa Lainnya)

Adapun perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 disebabkan karena melambatnya beberapa lapangan usaha seperti Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Keaktifan Sosial serta Jasa Lainnya. Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan turut memberikan andil terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung pada tahun 2017 (Publikasi Bada Pusat Statistik Kabupaten Bandung, diakses 17 Januari 2019 pukul 06.28).

Berdasarkan uraian di atas mengenai berbagai sektor pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi, salah satu yang dianggap memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah belanja modal. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yaitu berupa tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Namun pada kenyataannya anggaran belanja modal yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seringkali tidak terserap dengan optimal. Kondisi demikian terjadi pada Kabupaten Bandung, dimana belanja modal Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2013-

2017 memiliki realisasi yang fluktuatif serta anggaran belanja modal yang telah dianggarkan dalam APBD seringkali tidak terserap dengan optimal. Berikut Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017.

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persentase	Minimal	Maksimal	Keterangan
2013	508.221.239.060,06	449.078.124.664,00	(59.143.114.396,06)	88,36	95%	100%	Tidak Tercapai
2014	643.721.820.957,00	473.371.826.705,00	(170.349.994.252,00)	73,54	95%	100%	Tidak Tercapai
2015	806.526.950.510,96	708.464.526.697,00	(98.062.423.813,96)	87,84	95%	100%	Tidak Tercapai
2016	622.720.836.776,00	569.467.789.003,50	(53.253.047.772,50)	91,45	95%	100%	Tidak Tercapai
2017	718.450.739.078,00	628.497.495.405,49	(89.953.243.672,51)	87,48	95%	100%	Tidak Tercapai

Sumber: LRAPBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.2, belanja modal Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017 memiliki realisasi yang fluktuatif serta anggaran belanja modal yang telah dianggarkan dalam APBD seringkali tidak terserap dengan optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95%. Berdasarkan tabel 1.2, penyerapan belanja modal Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017 masih dibawah 95%, hal ini mengesankan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran atau mungkin banyak program yang tidak dijalankan.

Salah satu kelemahan dalam perencanaan anggaran tersebut tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2013. Pemerintah Kabupaten Bandung menyajikan realisasi belanja modal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp449,08 miliar dan Rp489,59 miliar. Dari nilai realisasi sebesar Rp449,08 miliar tersebut, terdapat kesalahan klasifikasi penganggaran belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretariat Daerah masing-masing sebesar Rp52,66 miliar dan Rp829 juta. Realisasi belanja modal tersebut merupakan belanja kegiatan yang direncanakan untuk diserahkan kepada sekolah swasta dan masyarakat sehingga tidak tepat dianggarkan sebagai belanja modal karena tidak akan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bandung.

Anggaran belanja modal yang tidak terserap dengan optimal jelas akan merugikan, mengingat belanja modal sebagai bentuk pengeluaran antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal, akan mampu menimbulkan permintaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga aktifitas ini akan menciptakan *multiplier effect* terhadap aktifitas ekonomi yang akan membentuk produk domestik bruto suatu daerah yang mencerminkan perubahan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dilihat dari realisasi anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017, menunjukkan realisasi anggaran belanja daerah pemerintah lebih banyak terserap pada realisasi belanja tidak langsung,

utamanya untuk pengeluaran belanja pegawai, sehingga alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017 relatif kecil. Alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.

Tabel 1.3
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
2013	449.078.124.664,00	3.242.165.132.570,50	13,85
2014	473.371.826.705,00	3.823.064.504.314,00	12,38
2015	708.464.526.697,00	4.229.818.758.017,81	16,75
2016	569.467.789.003,50	4.640.192.716.482,49	12,27
2017	628.497.495.405,49	4.609.698.467.829,26	13,63

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2018)

Tabel 1.3 menunjukkan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2013-2017. Tahun 2013 rasio belanja modal terhadap total belanja daerah sebesar 13,85 persen. Tahun 2014 rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mengalami penurunan menjadi 12,38 persen. Tahun 2015 rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mengalami kenaikan menjadi 16,75 persen. Tahun 2016 rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mengalami penurunan kembali menjadi 12,27 persen. Tahun 2017 rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mengalami kenaikan kembali menjadi 13,63 persen.

Hasil beragam ditemui dalam penelitian mengenai hubungan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Maolana Amin Iskandar (2012) dan Yunita Kumala Sari (2015) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan hasil penelitian Hafi Dianan Pratiwi (2015), M. Rizal Rahadi (2015), dan Fadilah (2017) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fenomena di atas, mendorong penulis untuk melihat bagaimana pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul **“PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013-2017”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis telah mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Perekonomian Kabupaten Bandung dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan terjadi kenaikan nilai PDRB pada setiap tahunnya. Kendati demikian trend Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017 menunjukkan terjadinya perlambatan nilai LPE pada beberapa tahun tertentu.

2. Belanja modal Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017 memiliki realisasi yang fluktuatif serta anggaran belanja modal yang telah dianggarkan dalam APBD seringkali tidak terserap dengan optimal. Penyerapan belanja modal Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017 masih dibawah 95%.
3. Alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017 relatif kecil karena realisasi anggaran belanja daerah pemerintah lebih banyak terserap pada realisasi belanja tidak langsung, utamanya untuk pengeluaran belanja pegawai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh belanja modal tanah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?
2. Seberapa besar pengaruh belanja modal peralatan dan mesin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?
3. Seberapa besar pengaruh belanja modal gedung dan bangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?
4. Seberapa besar pengaruh belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?

5. Seberapa besar pengaruh belanja modal aset tetap lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?
6. Seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan penelitian di atas maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh belanja modal tanah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.
2. Mengetahui pengaruh belanja modal peralatan dan mesin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.
3. Mengetahui pengaruh belanja modal gedung dan bangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.
4. Mengetahui pengaruh belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.
5. Mengetahui pengaruh belanja modal aset tetap lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.
6. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Mengembangkan wawasan dan pemahaman mengenai konsep atau teori-teori tentang Ilmu Administrasi Publik serta Ilmu Administrasi Keuangan Negara pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya. Selain itu, peneliti dapat mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

b. Bagi Lembaga

Dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi mengenai pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

c. Bagi Umum

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman, khususnya mengenai pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas, yakni mengenai teori dan pengaruh belanja modal dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur tambahan untuk penelitian mendatang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti mampu menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Lembaga

Dapat menjadi masukan yang membangun dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bandung.

c. Bagi Umum

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat digunakan untuk sumber informasi dan bahan pembandingan di kalangan akademis dalam penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional (Pasolong, 2014: 3). Sedangkan istilah publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat (Pasolong, 2014: 6).

Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan pesonel publik di oganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan (Chandler & Plano dalam Pasolong, 2014: 7).

Salah satu kajian administrasi publik adalah administrasi keuangan negara. Administrasi keuangan publik atau administrasi keuangan negara dan daerah, dimaknai sebagai serangkaian proses aktivitas yang dilakukan oleh aparatur negara/daerah, dimana aktivitas itu terdiri atas tahapan-tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek keuangan negara/daerah, yang dimulai dari proses tahap perumusan kebijakan (perencanaan), pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, pengawasan, hingga tahap perhitungan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah (Banga, 2017: 2).

Keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya. Secara ringkas, keuangan negara ialah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan milik negara (Anggara, 2016: 11).

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah, baik berupa uin maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sudaryo, dkk, 2017: 103).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan pokok utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan sudah seharusnya dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dalam suatu organisasi pemerintahan. Sehubungan dengan hal di atas, maka disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) pada setiap tahunnya sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. APBD meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pada kelompok belanja, terdapat dana dalam bentuk belanja modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Kategori belanja modal sesuai dengan kategori aset tetap, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Siregar, 2015: 167).

Belanja modal dianggap memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil (tidak termasuk kenaikan harga), baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam periode tertentu. Karena itu, pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan nilai PDRB pada tahun tertentu ke tahun berikutnya. Untuk menghindarkan

kenaikan harga dalam perhitungan, maka data yang digunakan sebaiknya adalah PDRB dengan harga konstan dan bukan dengan harga berlaku.

Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dalam bentuk perkiraan laju pertumbuhan ekonomi tahunan atau untuk periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan tahunan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan formula sederhana, yaitu:

$$Laju\ Pertumbuhan = \frac{(PDRB_{HK.t} - PDRB_{hk.t-1})}{PDRB_{HK.t}} \times 100\%$$

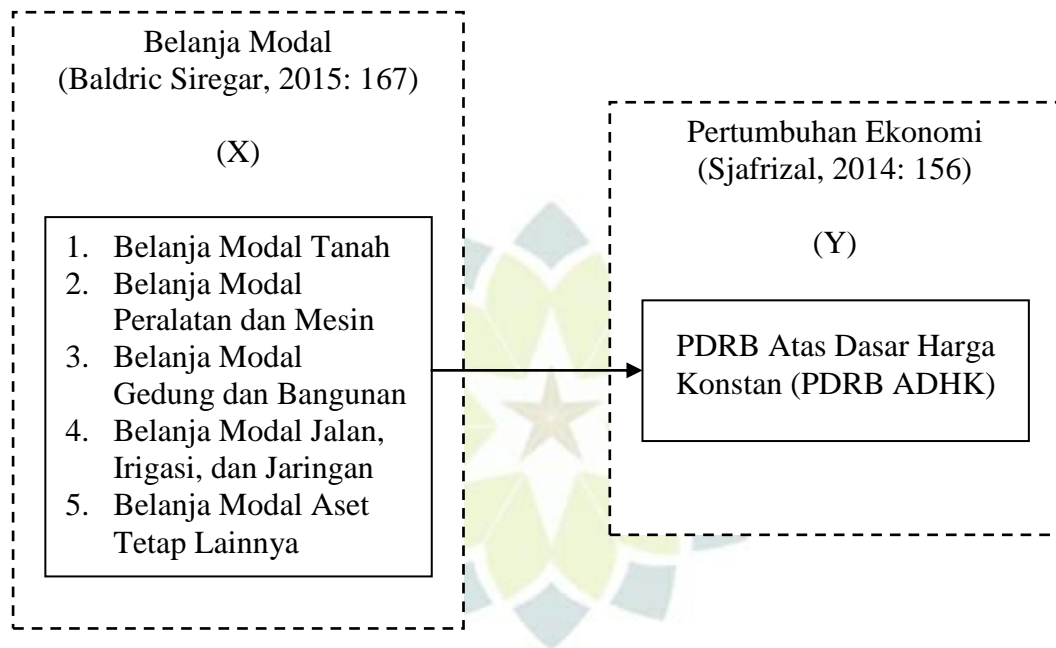
(Sjafrizal, 2014: 156)

Dimana $PDRB_{HK.t}$ adalah nilai PDRB dengan harga konstan pada tahun t sedangkan $PDRB_{HK.t-1}$ nilai PDRB pada tahun sebelumnya.

Belanja modal sebagai bentuk pengeluaran antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal, akan mampu menimbulkan permintaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga aktifitas ini akan menciptakan *multiplier effect* terhadap aktifitas ekonomi yang akan membentuk produk domestik bruto suatu daerah yang mencerminkan perubahan pertumbuhan ekonomi (Hidayat, 2017: 37).

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut merupakan gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

G. Hipotesis

Hipotesis 1

Ho: $\rho = 0$: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara belanja modal tanah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

Ha: $\rho \neq 0$: Terdapat pengaruh signifikan antara belanja modal tanah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

Hipotesis 2

Ho: $\rho = 0$: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara belanja modal peralatan dan mesin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

Ha: $\rho \neq 0$: Terdapat pengaruh signifikan antara belanja modal peralatan dan mesin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

Hipotesis 3

Ho: $\rho = 0$: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara belanja modal gedung dan bangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

Ha: $\rho \neq 0$: Terdapat pengaruh signifikan antara belanja modal gedung dan bangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

Hipotesis 4

Ho: $\rho = 0$: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

Ha: $\rho \neq 0$: Terdapat pengaruh signifikan antara belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

Hipotesis 5

Ho: $\rho = 0$: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara belanja modal aset tetap lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

Ha: $\rho \neq 0$: Terdapat pengaruh signifikan antara belanja modal aset tetap lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

Hipotesis 6

Ho: $\rho = 0$: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.

Ha: $\rho \neq 0$: Terdapat pengaruh signifikan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2013-2017.